

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi semua masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses pembangunan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Terwujudnya hasil dari pemerintahan yang baik salah satunya merupakan perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. Melalui hasil dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa, masyarakat langsung bisa menyampaikan gagasan, usulan, saran dan kritik yang baik sehingga dapat secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintahan yang baik, sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka sangat perlu dibuatkan perencanaan desa dengan baik. Oleh karena itu, guna membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa, maka perlu disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan masa jabatan dari Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Proses pembuatan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa Belun selama 6 (enam) tahun kedepan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2023.

1.3. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam pembuatan dokumen RPJM Desa ini dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam dokumen RPJM Desa ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman bagi Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tahun 2020 – 2026. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini memuat visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa selama masa jabatan.
2. Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa ini adalah :
 - a. Menyediakan dokumen strategis desa mulai perumusan visi, misi program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa, Organisasi kemasyarakatan Desa, masyarakat luas maupun berbagai pemeran pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.

- b. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintahan Desa Belun dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa.
- c. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program dan kegiatan.
- d. Menyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
- e. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pemeran pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di desa.

1.5. METODE PENYUSUNAN

Penyusunan RPJM Desa ini dilaksanakan dengan memeransertakan secara bersama-sama masyarakat secara seimbang termasuk kesetaraan jender. Masyarakat dalam hal ini merupakan subjek utama dalam pengambilan keputusan dalam perumusan perencanaan pembangunan. Melalui pendekatan dan metode partisipatif ini masyarakat bersama pemerintah desa melaksanakan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan review data yang dimiliki oleh desa, yakni data monografi desa, profil desa dan data potensi desa. Analisis dan up-date dilaksanakan untuk memperoleh data terkini demi mendukung keakuratan perencanaan. Review data ini dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, wakil-wakil dari wilayah maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama. Hasil dari kegiatan ini adalah informasi dokumenter terkini yang mendukung proses penyusunan perencanaan desa.
2. Pertemuan di desa untuk melakukan review terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah dilaksanakan selama 6 (enam) tahun sebelumnya. Hasil kegiatan ini berupa rekomendasi, masukan untuk kepentingan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
3. Bersamaan dengan hal diatas juga dilakukan pengumpulan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang berjalan maupun akan berjalan dari berbagai sumber pendanaan. Informasi ini dilaksanakan terutama oleh pihak Pemerintah Desa.
4. Pengkajian potensi dan masalah dilaksanakan untuk menjaring prioritas potensi dan masalah maupun alternatif pemecahan masalah dan kegiatan pengembangan potensi yang diusulkan. Hal ini dijaring melalui pertemuan informal yang dilakukan melalui berbagai jalur, baik melalui pertemuan dusun, RT, RW, LPMD, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya. Dalam aktifitas pengkajian potensi dilakukan penetapan prioritas masalah dan potensi dengan metode button up /

Partisipatif dan perumusan visi, misi dari masyarakat dan berbagai pihak dengan metode mengagagas masa depan (future search).

5. Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan secara partisipatif diatas, selanjutnya disusun draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) oleh tim Draf selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa Perencanaan.
6. Hasil Musyawarah Desa Perencanaan berupa masukan dan penyempurnaan selanjutnya diajukan untuk memperoleh penetapan oleh Pemerintah Desa bersama BPD dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Langkah-langkah diatas bisa digambarkan dalam bagan alir sebagaimana dibawah ini.

BAB II

PROFIL DESA BELUN

2.1 KONDISI DESA

2.1.1 Sejarah/Asal-Usul Desa

Berdasarkan cerita dari para sesepuh Desa Belun, bahwa konon nama Belun berasal dari kata Bahasa Jawa “*Ngrembelun*”, yang artinya rimbun. Sebutan “*Ngrembelun*” merujuk pada sebuah tempat di Desa Belun yang ditumbuhi sebuah pohon Gayam. Di bawah pohon tersebut terdapat sebuah “*sendang*” (mata air) yang dulu dijadikan tempat singgah orang-orang untuk sekedar berteduh atau mengambil air minum. Lama-kelamaan tempat tersebut menjadi ramai dan di sekitarnya muncul pemukiman warga, semakin lama semakin ramai yang sampai saat ini menjadi wilayah Desa Belun.

Para Pejabat Kepala Desa Belun adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Nama Kepala Desa Belun

No	Periode	Nama	Keterangan
1	– 1940	Mardjan	
2	1940 – 1970	Roestaman	
3	1970 – 1998	Hadi Subagio	
4	1999 – 2008	Mahfur	
5	2008 – 2014	Mahfur	
6	2014 – 2020	Bambang Sujoko	
7	2020 – 2026	Bambang Sujoko	

2.1.2 Demografi Desa

Desa Belun merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Temayang, yang terletak 5 Km ke arah Utara dari Kecamatan Temayang, Desa Belun mempunyai luas wilayah seluas 304,475 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Belun:

Tabel 2. Batas-Batas Desa Belun

BATAS DESA	
Sebelah Utara	Berbatasan dengan Desa Ngujung Kecamatan Temayang
Sebelah Timur	Berbatasan dengan Desa Pandantoyo Kecamatan Temayang

Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Desa Temayang Kecamatan Temayang
Sebelah Barat	Berbatasan dengan Desa Jono Kecamatan Temayang

Iklm Desa Belun, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Belun Kecamatan Temayang.

Desa Belun terdiri dari 2 dusun diantaranya Dusun Krajan dan Dusun Pilangrejo; dengan jumlah penduduk 2.714 Jiwa atau 875 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Belun

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	1.362
2.	Perempuan	1.352
3.	Kepala Keluarga	875

A. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Belun dapat dilihat pada Tabel berikut di bawah ini:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Desa Belun Berdasarkan Usia

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Bln – 12 Bln	25
2.	12 Bln – 5 Thn	104
3.	5 Thn – 10 Thn	145
4.	10 Thn – 25 Thn	528
5.	25 Thn – 60 Thn	1441
6.	60 Thn tahun keatas	471
Jumlah		2.714

B. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Belun mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Belun Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	1.304	1.298	2.710
2.	Kristen	2	2	4
3.	Katholik	0	0	0
4.	Hindu	0	0	0
5.	Budha	0	0	0
6.	Konghuchu	0	0	0
7.	Lain-lain	0	0	0

C. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Belun Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	389
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	285
4.	Tamat SD / sederajat	961
5.	Tamat SLTP / sederajat	588
6.	Tamat SLTA / sederajat	394
7.	Tamat D-1, D-2, D-3	29
8.	Tamat D-4/S-1	60
9.	Tamat S-2	8

D. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Belun sebagian besar masih berada di sector pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 7. Jumlah Penduduk Desa Belun Berdasarkan Pekerjaan

Petani	Buruh Tani	PNS/TNI/ POLRI	Swasta	Pedagang	Belum Bekerja	Lain-Lain
717	219	25	596	18	455	684

2.1.3 Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Belun seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Belun bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran meliputi:

1. Dana Transfer
 - a. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - c. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;

3. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
4. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan desa terdiri dari:

- a. Tanah kas desa
- b. Bangunan desa yang dikelola desa
- c. Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Belun sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

2.1.5 Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan
 - Posyandu : 2 unit
 - Lansia : 2 unit
 - Polindes : 1 unit
 - Bidan Desa : 1 orang
2. Prasarana Pendidikan
 - TK / RA : 2 unit
 - SD / MI : 2 unit
 - SLTP / MTs : 1 unit
 - SLTA / MA : 1 unit
 - TPA / TPQ : 5 unit
3. Prasarana Umum Lainnya
 - Tempat ibadah : 25 unit
 - Lapangan : 1 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri,

dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

1. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
2. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
3. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.

Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggali berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.2 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Belun dengan luas wilayah 304,475 ha yang terdiri dari dua dusun yaitu: Dusun Krajan dan Dusun Pilangrejo. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Belun terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 2 Kepala Dusun. Desa Belun terdiri dari 2 Rukun Warga (RW) dan 10 Rukun Tangga (RT).

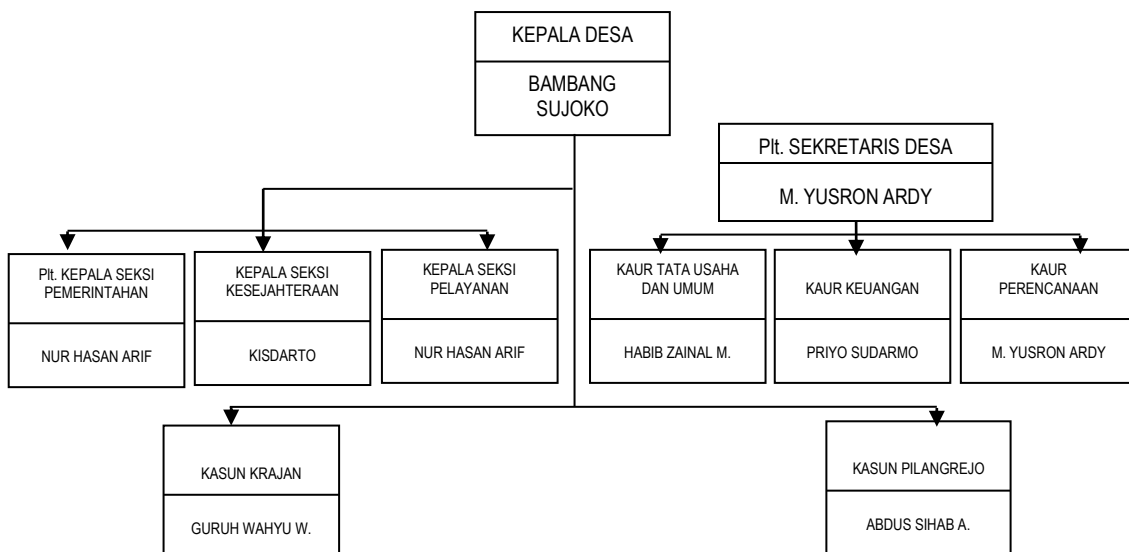
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagan 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Belun



BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1 POTENSI

Desa Belun memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/ organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal di berdayakan.

3.1.1 Sumber Daya Alam

Desa Belun memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/ organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal di berdayakan, diantaranya;

1. Lahan pertanian (sawah) seluas 116,690 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal;
2. Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur seluas 187,785 Ha, belum dikelola secara maksimal;
3. Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan;
4. Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan bubuk organik;
5. Adanya potensi sumber air dan sungai yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar.

3.1.2 Sumber Daya Manusia

1. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi;
2. Terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian masalah;
3. Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa;
4. Besarnya sumberdaya perempuan usia produktif sebagai tenaga kerja produktif yang dapat mendorong potensi industry rumah tangga;
5. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun;
6. Adanya kader sehat yang cukup, dari bidan sampai kader di posyandu yang ada di setiap dusun.

3.1.3 Kelembagaan/Organisasi

1. Hasil Identifikasi kelembagaan terdapat BPD, LPMD, PKK, karang taruna, lembaga sosial kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di Desa Belun Lembaga tersebut meliputi Gapoktan, PKK, Posyandu (Kader Posyandu).

2. Hasil pemetaan kelembagaan yang dilakukan pada waktu proses pengkajian potensi dan masalah menunjukkan lembaga kemasyarakatan yang eksis dan memiliki pengaruh langsung dalam menggerakkan masyarakat adalah pelaku dan kades Desa Belun selengkapnya dapat disimak sebagaimana bagan berikut dan seterusnya.

3.1.4 Infrastruktur Pendukung

1. Sarana transportasi atau akses jalan di Desa Belun Kondisi Baik kurang lebih 6000m, rusak kurang lebih 2500m, jalan makadam kurang 600m yang perlu pembenahan. Di seluruh wilayah desa hanya jalan paving dan jalan makadam. Jalan aspal adalah satu-satunya ruas jalan yang menghubungkan Jono dan Sugihwaras.
2. Kondisi dan fungsi jalan Poros Desa yang menghubungkan desa keluar dalam kondisi baik. Sedangkan kondisinya jalan paving dan jalan makadam banyak yang mengalami kerusakan dan kurang perawatan. Lokasi jalan-jalan tersebut terdapat di beberapa lingkungan RT.
3. Keadaan transportasi yang masuk ke desa adalah kendaraan bermotor dan kendaraan truk. Sedangkan transportasi lokal adalah kendaraan pribadi berupa sepeda motor dan mobil pribadi.
4. Sarana irigasi yang telah ada di Desa Belun masih berupa tanah selokan kurang lebih 9800m dan terdapat yang area air dari Desa Temayang yang masih berupa selang/perpipaan.
5. Infrastruktur pendukung yang lain antara lain meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas perkantoran, fasilitas olah raga, fasilitas MCK, fasilitas pompa air, dan seterusnya.

3.2 MASALAH

3.2.1 Masalah Dan Potensi Dari Potret Desa

Tabel 8. Masalah Dan Potensi Dari Potret Desa

No.	MASALAH	POTENSI
1	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	Tenaga Gotong Royong
2	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	PKK Kader-Kader di desa Pos Kesehatan Desa
3	Terdapat anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk)	Pos Kesehatan Desa Posyandu Kader Posyandu

4	Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik	Pekarangan rumah Kader Desa Petani
5	Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolahan pasca panen	Lahan persawahan Kelompok tani Hasil panen
6	Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan	Lahan Peternak
7	Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk	Kelompok tani Kotoran Ternak
8	Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK	Lokal Guru Pengajar

3.2.2 Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim

Tabel 9. Masalah Dan Potensi Berdasarkan Musim

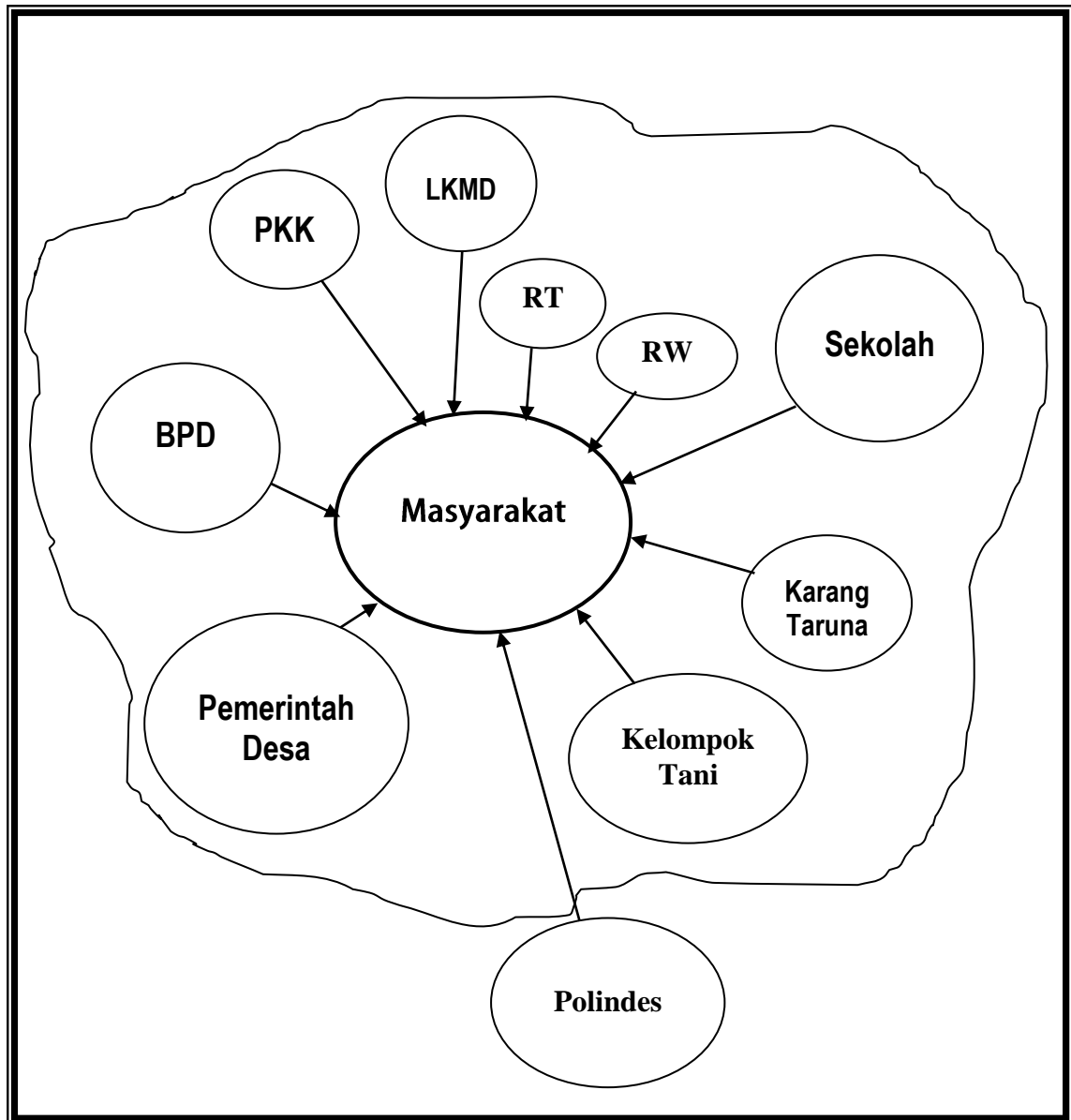
No.	Masalah/Kegiatan/Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Musim tanam padi	√								√	√	√	√
2.	Musim tanam tembakau			√	√	√	√	√					
3.	Musim kering / sulit air					√	√	√	√	√			
4.	Kesehatan (banyak penyakit)	√							√	√			

Tabel 10. Masalah Dan Potensi Musim

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Pada saat musim hujan terjadi luapan air dari saluran drainase	- Saluran Air - Swadaya Masyarakat
2.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit	- Mantri - Bidana - Posyandu - Kader Posyandu
3.	Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah)	- Pos kesehatan desa - Bidan desa - Kader PKK - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Pada saat kemarau beberapa wilayah desa kekurangan air	- Pompa Air - Swadaya Masyarakat

3.2.3 Masalah Dan Potensi Dari Kelembagaan Desa

Bagan 2. Bagan Kelembagaan Desa



Tabel 11. Masalah Dan Potensi Kelembagaan/Organisasi Desa

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES dan BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Desa belum memiliki badan usaha yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia - Ada usaha yang bisa dikembangkan

2	LKMD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus LKMD sebagian tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	KELOMPOK TANI	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna - Sarana prasana menuju persawahan sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap
4	KARANG TARUNA	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus Karang taruna tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
5	PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial - Ada program kerja - Sarana tersedia
6	SEKOLAH/ TEMPAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana sekolah kurang memadai - Insentif tenaga pengajar masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengajar - Murid - Lahan pendidikan - Program kerja
7	POLINDES	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana - Sarana prasarana kesehatan kurang memadai - Insentif kader masih rendah - Pengurus/kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung polindes - Kader Posyandu - Program kerja - Posyandu

BAB IV

RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2020 – 2026

4.1 VISI DAN MISI

4.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Belun ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Belun seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Belun adalah:

“Terwujudnya Desa Belun yang MADANI (Beriman, Damai, dan Bernuansa Islami), membangun mental yang sehat menuju Desa Mandiri yang bermartabat.”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

4.1.2 Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. Menlanjutkan pengembangan dibidang keagamaan, kesehatan, fasilitas desa serta mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat melalui program pemerintah;
2. Mewujudkan dan meingkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik, modern, efekti, efisien, dan bermoral;

3. Memberdayakan semua potensi yang ada di masyarakat, yang meliputi pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA).

4.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan Pembangunan Desa Belun akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lain. Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
8. Membantu para petani dalam permodalan.

4.3 RENCANA KEGIATAN DESA

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Belun yang meliputi empat bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Belun tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu:

4.3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
2. Realisasi pembangunan Balai Desa.
3. Penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran data-data Desa.
4. Penyelenggaraan musyawarah/perencanaan Desa.

5. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa.
6. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa.
7. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa.
8. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa.
9. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Penertiban distribusi PBB.

4.3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 6. Pembangunan jembatan Desa.
 7. Pembangunan Monumen/Gapura/Batas Desa.
 8. Dukungan pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab RTLH.
 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
 2. Posyandu Balita dan Posyandu Lansia.
 3. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa.
 4. Sarana dan prasarana kesehatan.
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 4. Dukungan kepada PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal.
 5. Dukungan pendidikan bagi siswa Miskin/Berprestasi.

- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 2. Penguatan permodalan BUM Desa
 3. Pembibitan tanaman pangan
 4. Pengadaan alat-alat pertanian.
 5. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian.
 6. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
 7. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
 8. Mesin pakan ternak
 9. Pengembangan benih lokal
 10. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 11. Pengembangan ternak secara kolektif

4.3.3 Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
3. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah.
4. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
5. Pembinaan PKK.

4.3.4 Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa

1. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian.
2. Pelatihan teknologi tepat guna.
3. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa.
5. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - a. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - b. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - c. Kelompok Perempuan
 - d. Kelompok Tani
 - e. Kelompok Masyarakat Miskin
 - f. Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - g. Kelompok perlindungan anak
 - h. Kelompok Pemuda
 - i. Kelompok Keagamaan

BAB V

PENUTUP

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Belun memuat agenda – agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Belun menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Belun.

Belun, 27 Mei 2020

Tim Penyusun

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2020 S.D 2026

DESA : PEMERINTAH DESA BELUN
KECAMATAN : KECAMATAN TEMAYANG
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI : PROVINSI JAWA TIMUR

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA															
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Belun	6 Kegiat	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	360.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Belun	6 Kegiat	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.456.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Belun	6 Paket	Menyediakan Kebutuhan Perkantoran	✓	✓	✓	✓	✓	✓	41.000.000,00	DDS, PAD	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Belun	6 Kegiat	Meningkatkan Kesejahteraan BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Belun	6 Kegiat	Meningkatkan Kesejahteraan RW/RT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional Operator Desa.	Desa Belun	6 Kegiat	Meningkatkan Kesejahteraan Operator Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19.500.000,00	PBH	✓		
		Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Belun	1 Kegiat	Tali Asih Kepala Desa yang Telah Purna						✓	50.000.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Perangkat Desa	Desa Belun	6 paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	450.000.000,00	PAD	✓		
		Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB	RT.01 s/d RT.10	6 Kegiat	Menciptakan Pembayaran pajak yang tepat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	PBK	✓		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	DESA BELUN	3 Paket	Sarana Pemerintahan Desa			✓	✓			5.000.000,00	ADD	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Desa Belun	1 Kegiat:			✓	✓	✓	✓	✓	352.000.000,00	DDS, PBH	✓		
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Belun	6 Kegiat:	Meningkatkan Kualitas Pendataan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	PBH, PBK	✓		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Belun	6 kegiat:	Terlaksananya Musyawarah Desa yang Transparan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	52.000.000,00	ADD, PAD	✓		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Belun	6 Kegiat:	Terciptanya sistem perencanaan yang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17.000.000,00	PAD, PBH, PBK	✓		
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Belun	6 Kegiat:	Terciptanya Sistem Keuangan yang transparan.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.500.000,00	ADD, PBH, PBK	✓		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Belun	6 Kegiat:	Pemerintah desa sbg Pelayanan Desa yang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.500.000,00	ADD, PAD	✓		
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Belun	6 Kegiat:	Pengembangan Sistem Informasi yang Maju dan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.600.000,00	DDS, PBH, PBK	✓		
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa Belun	1 Kegiat:	Terlaksananya Pemilihan kepala Desa Tahun 2025						✓	75.000.000,00	PBK	✓		
		Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa Belun	1 Kegiat:	Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan		✓					50.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pertanahan	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Belun	1 Kegiat:	Pengadaan Privikasi SPPT PBB Secara		✓					15.000.000,00	PAD	✓		
JUMLAH PER BIDANG												3.364.100.000,00				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Belun	30 Orang	Menunjang Kesejahteraan Tenaga Pendidik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	66.500.000,00	DDS	✓		
		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Desa Belun	1 Kegiat:	Mengembangkan kapasitas belajar siswa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Desa Belun	2 kegiatan	Peningkatan Kapasitas belajar siswa			✓				190.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Bela	Desa Belun	1 Kegiatan					✓			150.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	DESA BELUN	6 Kegiatan	Meningkatkan kesehatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	55.610.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Belun	6 Kegiatan	Mencegah terjadinya gizi buruk pada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	136.525.000,00	DDS	✓		
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	DESA BELUN	1 Kegiatan		✓		✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	ADD	✓		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Belun	0	Pencegahan Virus Covid-19		✓	✓				60.000.000,00	DDS	✓		
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Belun	0		✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.200.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	DESA BELUN	2 kegiatan	Meningkatkan sarana kesehatan			✓	✓	✓		175.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa belun	13 Titik	Supaya Jalannya Terang	✓	✓	✓				511.658.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Jembatan Desa	Batas Desa Belun Pandantoyo	1 Kegiatan	Untuk meningkatkan kelancaran				✓			54.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	RT. 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10	3 Kegiatan	Supaya airnya lancar dan tidak banjir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	297.600.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Embung Milik Desa	Desa Belun	1 Titik	Untuk irigasi Pertanian					✓		75.000.000,00	PBK	✓		
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Belun	18 Titik	Tugu masuk gang dan batas Desa		✓					210.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pergerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	RT. 01,02,03,0 4,05,06,07,08,0 9,10	10 Kegiat	Kenyamanan Masyarakat	✓					✓	600.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pergerasan Jembatan Milik Desa **)	RT. 01,02,03,0 4,05,06,07,08,0 9,10	10 Titik	Demi kenyamanan warga	✓					✓	140.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Belun	1 Kegiat	Supaya tidak longsor			✓				82.600.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	Desa Belun	2 Kegiat	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	170.000.000,00	ADD, DDS	✓		
		Pembangunan / Pengembangan / Pemeliharaan / Pengelolaan sarana dan prasarana pasar Desa/Pasar Hewan	RT. 01,02,03,0 4,05,06,07,08,0 9,10	10 Titik	Meningkatkan sarana pertanian					✓	✓	100.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	DESA BELUN	1 Lokal	Supaya airnya lancar						✓	60.000.000,00	DDS	✓		
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	DESA BELUN	1 Paket	Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat					✓		350.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	DESA BELUN	1 kegiata	Menambah Income Desa			✓	✓			100.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												3.546.903.000,00				
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Belun	60 Kegiat	Demi terciptanya keamanan dan ketenteraman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Belun	0		✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa Belun	0		✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	Desa Belun	6 kegiata	Membina dan Meningkatkan Kinerja PKK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JUMLAH PER BIDANG												370.000.000,00				
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa Belun	2 Kegiat:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				✓	✓	✓	70.000.000,00	PBK	✓		
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Belun	3 Kegiat:	Meningkatkan Kualitas Pertanian Masyarakat				✓	✓	✓	550.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	Desa Belun	6 Kegiat:	Meningkatkan kapasitas Aparatur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	90.000.000,00	ADD, DDS	✓		
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Belun	5 Kegiat:	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDS	✓		
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Belun	5 kegiatan:	Memberikan dan meningkatkan Perlindungan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000.000,00	DDS, PBK	✓		
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa Belun	1 kegiatan:	Membentuk Organisasi Koperasi yang				✓			30.000.000,00	PBK	✓		
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa Belun	5 Kegiat:	Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa Belun	1 Kegiat:	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa						✓	350.000.000,00	DDS	✓		
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Belun	5 Kegiat:	Meningkatkan Kreativitas dan Pendapatan						✓	75.000.000,00	PBK	✓		
JUMLAH PER BIDANG												1.965.000.000,00				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK															
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	DESA BELUN	6 kegiatan:	Melatih Kesiapan Tim Siaga Bencana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	705.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Belun	1 Kegiat:	Pencegahan Keadaan Darurat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000,00	DDS	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Belun	6 orang	Membantu Perekonimian Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	21.600.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												801.600.000,00				
JUMLAH TOTAL												10.047.603.000,00				
<p>KEPALA DESA</p> <p>BAMBANG SUJOKO</p>																